

**PERAN ECPAT DALAM MENURUNKAN TINGKAT KASUS  
EKSPLOITASI SEKS ANAK DI THAILAND TAHUN 2016-2020**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun Oleh:**

**Nama : Shinta Indriati**

**NIM : 07041381621142**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2023**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

PERAN ECPAT DALAM MENURUNKAN TINGKAT KASUS  
EKSPLOITASI SEKS ANAK DI THAILAND TAHUN 2016-2020

SKRIPSI

Dissusun Oleh:

Shinta Indriati

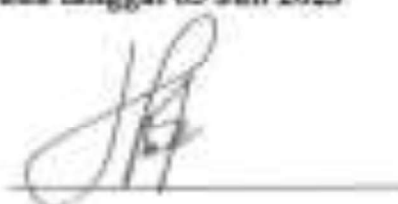
07041381621142

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 05 Juli 2023

Pembimbing 1

Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd

NIP. 197803022002122002



Pembimbing 2

Indra Tamsyak, S.IP., M. Hub.Int

NIDN. 0025058808



Disetujui oleh:

Ketua Jurusan



Sofyan Elendi, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

PERAN ECPAT DALAM MENURUNKAN TINGKAT KASUS EKSPLOITASI SEKS  
ANAK DI THAILAND TAHUN 2016-2020

Skripsi

Oleh:

Shinta Indriati

07041381621142

Telah dipertahankan di depan penguji  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Pada tanggal 2023

Pembimbing:

Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd  
NIP. 197803022002122002

Indra Tamsyah, S.IP., M. Hub.Int  
NIP.198805252023211033.

Penguji:

Ferdiansyah R, S.IP., MA  
NIP. 1571071104890001

Nurul Aulia, S.IP., MA  
NIP. 199312222022032013

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan  
Internasional

Sofyan Efendi, S.IP., M.Si  
NIP: 196601221990031004



Dekan FISIP UNSRI

Dr. Alfitri, M.Si  
NIP: 196601221990031004

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shinta Indriati

NIM : 07041381621142

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul "**Peran Epat Dalam Menurunkan Tingkat Kasus Eksploitasi Seks Anak Di Thailand Tahun 2016-2020**" tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70 sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun

Palembang, 19 Juni 2023



Shinta Indriati

NIM. 07041381621142

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk; kedua orang tua tercinta: Ayah dan Ibu, Tak pernah cukup rasa terimakasih atas cinta kasih, pengorbanan dan kesabaran mereka. Serta almamater tercinta, Universita Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ilmu Hubungan Internasional.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Ecpat Dalam Menurunkan Tingkat Kasus Eksploitasi Seks Anak Di Thailand Tahun 2016-2020”** Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih pada yang terhormat:

1. Allah SWT atas segala berkah dan kemudahan yang diberikan
2. Kepada Kedua orang tua, Ayah dan Mama yang selalu memberi dukungan terbaik serta doa dan semangat yang tiada hentinya diberikan kepada penulis, yang telah membesarkan dan merawat penulis hingga saat ini
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya beserta jajaran pengurus Dekanat lainnya
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si. selaku Ketua Jurusan yang telah memberi bimbingan support serta arahan dan masukan selama perkuliahan.
5. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembimbing akademik serta dosen pembimbing skripsi I yang telah memberikan arahan, saran dan masukan dalam penyusunan proposal skripsi ini.
6. Bapak Indra Tamsyah S.IP., M.Hub.Int selaku dosen pembimbing II yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dan semangat dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas segala Ilmu dan dedikasinya selama perkuliahan dan para staf karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu segala keperluan administrasi selama masa perkuliahan maupun dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan penulis. Semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Palembang, Juni 2023

Shinta Indriati

## ABSTRAK

Studi ini mengkaji peran ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) dalam mengurangi kasus eksploitasi seksual anak di Thailand dari tahun 2016 hingga 2020. ECPAT adalah organisasi non-pemerintah yang berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak dan memerangi komersial eksploitasi seksual anak. Studi ini menganalisis strategi dan inisiatif ECPAT selama periode tertentu, dengan fokus pada peningkatan kesadaran, advokasi kebijakan, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Temuan menunjukkan bahwa ECPAT memainkan peran penting dalam mengurangi prevalensi eksploitasi seksual anak di Thailand. Melalui upayanya, ECPAT memfasilitasi undang-undang yang lebih baik, penegakan, dan langkah-langkah perlindungan, menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi para pelaku dan kondisi yang lebih aman bagi anak-anak. Layanan pencegahan dan dukungan korban organisasi juga berkontribusi terhadap penurunan kasus eksploitasi secara keseluruhan. Namun, studi ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh ECPAT, termasuk sumber daya yang terbatas dan perlunya kolaborasi yang berkelanjutan di antara para pemangku kepentingan. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan dampak ECPAT, dengan menekankan pentingnya dukungan pemerintah yang berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat. Penelitian ini menggarisbawahi peran penting ECPAT dalam mengurangi eksploitasi seksual anak di Thailand dari tahun 2016 hingga 2020. Penelitian ini menggarisbawahi pendekatan multifaset organisasi tersebut dan perlunya upaya kolektif untuk melindungi anak-anak dan menghapus kejahatan yang menjijikkan ini.

Kata Kunci : ECPAT, Eksploitasi Seksual, Anak, Thailand, Hak Anak

Pembimbing 1



Hoiron Nisyak, S.Pd., M.Pd  
NIP. 197803022002122002

Pembimbing 2



Indra Tamsyah, S.IP., M. Hub.Int  
NIP.198805252023211033.

Palembang,  
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Sriwijaya



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP: 197705122003121003



## **ABSTRACT**

*This study examines the role of ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) in reducing child sexual exploitation cases in Thailand from 2016 to 2020. ECPAT is a non-governmental organization committed to safeguarding children's rights and combating commercial sexual exploitation of children. The study analyzes ECPAT's strategies and initiatives during the specified period, focusing on awareness-raising, policy advocacy, and collaboration with stakeholders. The findings indicate that ECPAT played a vital role in decreasing the prevalence of child sexual exploitation in Thailand. Through its efforts, ECPAT facilitated improved legislation, enforcement, and protection measures, creating an inhospitable environment for perpetrators and safer conditions for children. The organization's prevention and victim support services also contributed to the overall decline in exploitation cases. However, the study highlights challenges faced by ECPAT, including limited resources and the need for sustained collaboration among stakeholders. Recommendations are provided to enhance ECPAT's impact, emphasizing the importance of continued government support and societal engagement. This research underscores the significant role of ECPAT in reducing child sexual exploitation in Thailand from 2016 to 2020. It underscores the organization's multifaceted approach and the necessity of collective efforts to protect children and eliminate this abhorrent crime.*

*Key Words : ECPAT, Sexual Exploitation, Children, Thailand, Children's Rights*

**Pembimbing 1**



**Hoiron Nisvak, S.Pd., M.Pd**  
NIP. 197803022002122002

**Pembimbing 2**



**Indra Tamsyah, S.IP., M. Hub.Int**  
NIP.198805252023211033.

**Palembang,  
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Sriwijaya**



**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si**  
NIP: 197705122003121003



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	8
1.4.2 Manfaat Praktis .....	9
1.5 Tinjauan Pustaka.....	9
1.6 Kerangka Konseptual.....	14
1.6.1 International Non-Governmental Organizations (INGO)	14
1.6.2 Peran International Non-Governmental Organizations (INGO)	20
1.7 Alur Pemikiran.....	29
1.8 Argumentasi Utama/ Hipotesis.....	29
1.9 Metode Penelitian .....	30
1.9.1 Desain Penelitian.....	30
1.9.2 Unit Analisis .....	31
1.9.3 Jenis dan Sumber Data .....	31
1.9.4 Fokus Penelitian .....	32

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data .....	32
1.9.6 Teknik Keabsahan Data .....	32
1.9.7 Teknik Analisis Data.....	33
1.9.8 Jadwal Penelitian.....	34
<b>BAB II PROFIL ECPAT DAN ESKA DI THAILAND .....</b>	<b>36</b>
2.1 Gambaran Umum ECPAT .....	36
2.1.1 Struktur Organisasi ECPAT Foundation .....	37
2.1.2 Visi dan Misi ECPAT .....	38
2.1.3 Tugas ECPAT .....	39
2.1.4 Fungsi ECPAT .....	40
2.2 ECPAT Masuk Thailand.....	41
2.3 Pariwisata Seks Di Thailand.....	43
2.4 Keadaan Prostitusi Anak di Thailand .....	46
<b>BAB III PERAN ECPAT DALAM MENANGANI PROSTITUSI ANAK DI THAILAND .....</b>	<b>51</b>
3.1 Peran Implementer .....	51
3.1.1 Mobilisasi Sumber Daya .....	54
3.2 Peran Katalis .....	58
3.2.1 Menginisiasi Perubahan .....	58
3.3 Peran Partner.....	59
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
4.1 Kesimpulan .....	61
4.2 Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Table 1 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>12</b>
<b>Table 2 Fokus Penelitian.....</b>	<b>32</b>
<b>Table 3 Jadwal Peneltian .....</b>	<b>34</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1 Alur Pemikiran.....</b>	<b>29</b>
<b>Gambar 2 Logo ECPAT Foundation Thailand.....</b>	<b>36</b>
<b>Gambar 3 Struktur ECPAT Internasional .....</b>	<b>38</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perbudakan merupakan fenomena yang sudah ada sejak zaman manusia baru mulai bertani. Sebagaimana evolusi dan perkembangan peradaban manusia, laki-laki dewasa sebagai makhluk yang lebih dominan secara fisik bertugas sebagai pemburu dan mencari makan. Sedangkan perempuan dan anak, yang tidak sekuat laki dewasa secara fisik terpaksa harus berada di rumah. Hal ini merupakan munculnya dominasi lelaki atau patriarki di masyarakat yang kita lihat hari ini. Perempuan hanya dilihat sebagai penjaga rumah dan alat pemuas nafsu lelaki.

Pada saat manusia sudah mulai memasuki fase bertani dan menetap di satu tempat, perlu adanya perluasan wilayah dengan cara berperang dan menjajah. Dari situlah terlahir perbudakan, di mana pihak yang kalah dan tidak tewas dalam perang dijadikan tahanan dan budak pemenang dan yang tersisa cenderung adalah anak dan perempuan. Semenjak itu, perdagangan perempuan telah terbagi menjadi dua, yaitu untuk menjaga dan membantu dalam rumah dan sebagai alat pemuas hasrat seksual lelaki.

Perdagangan manusia merupakan bentuk kontemporer dari perbudakan. Perdagangan manusia cenderung dilakukan dengan cara menipu dan memberikan janji-janji palsu. Sedikit berbeda metodenya dengan perbudakan di mana dilakukan melalui proses perang, penyerbuan, dan aktifitas-aktifitas teror lainnya. Eropa merupakan benua yang penuh dengan negara-negara penjajah. Dan kemanapun mereka pergi, mereka selalu membawa hadiah bagi keluarganya yang menunggu dirumah. Hadiah ini cenderung berbentuk rampasan perang, yaitu perhiasan dan budak.

Dalam penjajahan Eropa di Afrika, penjajah yang berada disana selain menjual orang-orang Afrika ke Eropa sebagai budak, merindukan perempuan Eropa. Perempuan Eropa mulai diculik dan dikirim layaknya barang ke Afrika untuk dijadikan sebagai budak seksual. Perbudakan seksual yang dibantu dengan perdagangan manusia setiap harinya berevolusi. Target perdagangan manusia tidak memandang bulu, baik lelaki, perempuan, bahkan anak-anak. Lelaki dijadikan sebagai budak yang memerlukan tenaga fisik, seperti pekerja tambang, plantasi atau pabrik, atau bahkan sebagai petarung untuk berjudi. Perempuan dijadikan sebagai budak rumahan, sebagai pembantu, dan juga sebagai alat pemuas hasrat nafsu lelaki. Terakhir, anak-anak diperdagangkan sebagai budak pekerja, bahan eksperimentasi layaknya hewan, dan sebagai budak seksual.

Perdagangan manusia kemudian dikembangkan kembali menjadi dilembagakan dalam bentuk rumah bordil atau prostitusi. Perempuan dan anak-anak dijual dan dipajangkan sebagai alat pemuas seksual. Anak, yang memiliki kekuatan fisik terlemah, menjadi target mudah untuk dijadikan budak seksual. Dengan muncul dan bertumbuhnya *fetish* seksual terhadap anak kecil, perdagangan anak semakin marak. Perdagangan anak kemudian berevolusi menjadi pariwisata seks anak.

Sejak kelahiran ECPAT pada tahun 1990, isu pariwisata seks anak telah menjadi fokus utamanya. ECPAT kemudian fokus pada benua Asia yang sedang mengalami peningkatan dalam perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak untuk dijadikan prostitusi. Asia merupakan benua yang memiliki banyak fenomena prostitusi anak, dan karena itu ECPAT mengubah nama mereka menjadi “*End Child Prostitution in Asian Tourism*”<sup>1</sup>. Penelitian ini akan fokus ke region Asia-Tenggara, yaitu Thailand.

---

<sup>1</sup> Millatina, A.H. (2018). Peran ECPAT Dalam Menangani Eksploitasi Seksual  
Indonesia. *Journal of International Relations*, Vol. 4, No. 3, h. 536-546



Pada awal tahun 1980-an, Thailand memperkenalkan konsep pariwisata yang memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, pariwisata telah menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan devisa negara ini sejak awal industri tersebut dibuka. Industri pariwisata di Thailand bahkan sejajar dengan sektor perbankan sebagai sumber devisa kedua terbesar di sektor jasa. Namun, di sisi lain, pariwisata Thailand memiliki fitur-fitur unik, seperti pertunjukan yang melibatkan perempuan transgender dan/atau pria yang berpakaian seperti perempuan.

Namun, di tengah perkembangan positif ini, muncul masalah serius yaitu kasus eksploitasi seksual komersial terhadap anak-anak oleh wisatawan asing. Anak-anak dieksploitasi secara seksual dan dikomersialisasikan oleh wisatawan asing yang sengaja datang ke Thailand untuk tujuan seksual komersial. Fenomena ini juga didorong oleh stigma bahwa Thailand merupakan negara dengan Child Sex Tourism terbesar di dunia. Hal ini sangat mengkhawatirkan dan harus ditangani dengan serius oleh pemerintah Thailand dan komunitas internasional.

Perlu ada langkah-langkah yang tegas untuk melawan eksploitasi seksual terhadap anak-anak dalam industri pariwisata Thailand. Kerjasama antara pemerintah, lembaga internasional, LSM, dan masyarakat sipil sangat penting dalam memerangi kasus ini. Peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, dan edukasi publik tentang dampak buruk eksploitasi seksual terhadap anak-anak harus menjadi prioritas. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran dan pelatihan bagi para pekerja di sektor pariwisata untuk mengenali dan melaporkan tindakan eksploitasi seksual terhadap anak-anak.

Thailand memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi pariwisata yang aman dan berkelanjutan. Dengan komitmen yang kuat dan langkah-langkah konkret dalam melawan eksploitasi seksual terhadap anak-anak, Thailand dapat memastikan bahwa pariwisata

negara ini memberikan manfaat positif bagi semua pihak yang terlibat, tanpa mengorbankan kesejahteraan dan keamanan anak-anak.<sup>2</sup>

Pariwisata Seks Anak bukanlah sebuah fenomena yang baru. Selama bertahun-tahun pedofil-pedofil mencari cara untuk menghindari hukuman berat di Amerika Serikat yang berkunjung ke negara-negara yang prostitusi anak banyak dan hukum penyiksaan seksualnya tidak ketat dan mudah dihindari. *Child Sex Tourism* adalah sebuah fenomena di mana anak dieksploitasi secara seksual, untuk dan/atau oleh wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Hal ini dilakukan dengan menjadikan pariwisata seksual sebagai destinasi pariwisata utama dan unik di negara itu.<sup>3</sup>

Pada awalnya, Thailand terkenal karena memasarkan fleksibilitas hukum seksual mereka kepada negara-negara barat. Mereka menawarkan kesempatan eksklusif yang sulit ditemukan di tempat lain, yaitu hubungan seksual dengan anak di bawah umur. Namun, pada Kongres Dunia tentang Anti-Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Stockholm tahun 1996, eksploitasi seksual komersial anak diidentifikasi sebagai kekerasan seksual yang melibatkan orang dewasa memberikan imbalan berupa uang tunai atau barang kepada anak, pihak ketiga, atau orang lain.

Masalah prostitusi anak di Thailand menjadi perhatian khusus bagi organisasi non-pemerintah End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT), yang bertujuan untuk memberantas prostitusi anak dan melindungi hak-hak anak dari eksploitasi seksual. ECPAT bekerja untuk menghentikan praktik ini dan menegakkan kebijakan yang melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual, khususnya di sektor pariwisata.

---

<sup>2</sup> Montgomery, H. (2001). *Child Sex Tourism in Thailand*. CAB Publisher, *Tourism and the Less Developed World: Issues and Case Studies*, Ch. 13, pg. 191

<sup>3</sup> Hechler, D. (1995). *Child Sex Tourism*. *The National Law Journal*.

Dalam menghadapi tantangan ini, kerjasama antara pemerintah Thailand, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil sangat penting. Perlu adanya upaya yang terkoordinasi untuk memperketat hukum dan penegakan hukum terkait prostitusi anak serta memberikan perlindungan yang kuat bagi anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi seksual. Selain itu, edukasi dan kesadaran publik juga perlu ditingkatkan untuk mengubah stigma dan norma yang memperparah masalah ini.

Thailand harus mengambil tindakan serius untuk melawan prostitusi anak dan eksploitasi seksual terhadap anak-anak. Dengan kebijakan yang tegas, penegakan hukum yang kuat, dan dukungan penuh dari masyarakat, Thailand dapat menjadi contoh dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa pariwisata negara ini tidak lagi menjadi tempat bagi eksploitasi seksual terhadap anak.

Pada tahun 1997, Thailand mengimplementasikan kebijakan *Prevention and Suppression of Trafficking in Women and Child Act* sebagai upaya untuk mengatasi eksploitasi seksual komersial anak. Namun, dalam rangka meningkatkan perlindungan anak, pemerintah Thailand kemudian mengeluarkan *Child Protection Act* pada tahun 2003, yang merupakan hasil ratifikasi dari tiga konvensi PBB tentang hak dan perlindungan anak. Kebijakan ini merupakan perbaikan dari kebijakan sebelumnya dan menjadi landasan untuk mengurangi eksploitasi seksual anak.

Pemerintah Thailand telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah eksploitasi seksual dan perdagangan manusia, terutama yang melibatkan anak-anak. Salah satu langkah penting adalah adopsi *The Anti-Trafficking in Persons Act* pada tahun 2008, yang bertujuan untuk mengurangi angka perdagangan manusia, termasuk

komersialisasi anak. Kebijakan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah Thailand dalam melawan praktik yang merugikan anak-anak.<sup>4</sup>

Selain itu, pemerintah Thailand juga mengeluarkan The National Plan of Action to Eliminate The Worst Forms of Child Labor pada periode 2009-2014. Langkah ini menunjukkan keseriusan mereka dalam mengatasi masalah pekerja anak yang rentan terhadap eksploitasi seksual dan kerja paksa. Pemerintah juga mengeluarkan The National Policy, Strategy, and Measures for the Prevention and Suppression of Trafficking in Persons pada tahun 2011-2016, yang merupakan langkah konkret dalam pencegahan dan penindakan terhadap perdagangan manusia.

Semua upaya ini adalah bukti nyata dari komitmen dan keseriusan pemerintah Thailand dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dan perdagangan manusia. Langkah-langkah ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan dan perlindungan yang holistik. Pemerintah Thailand terus berupaya meningkatkan kebijakan dan tindakan dalam rangka memerangi masalah ini.

Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam melawan eksploitasi seksual dan perdagangan manusia di Thailand. Perlu adanya kerjasama yang erat antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil dalam upaya pencegahan, identifikasi, penindakan, dan rehabilitasi korban. Dengan kerja sama yang kuat dan upaya berkelanjutan, diharapkan bahwa Thailand dapat menjadi contoh dalam melindungi anak-anak dan menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari eksploitasi seksual dan perdagangan manusia.

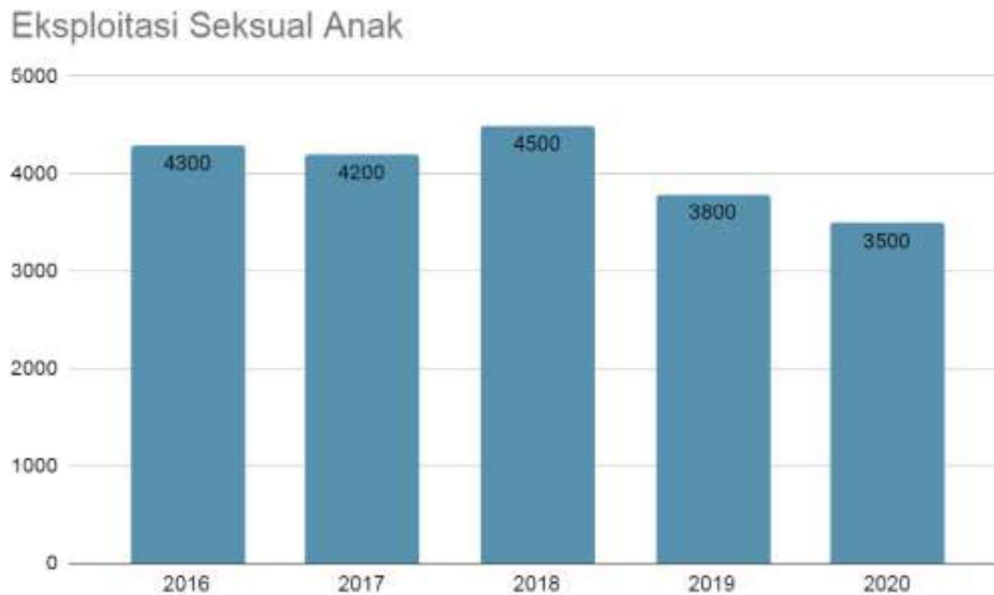
Namun, meskipun perjuangan pemerintah Thailand untuk mengurangi eksploitasi anak yang masif dengan mengeluarkan berbagai kebijakan perlindungan anak, hal yang

---

<sup>4</sup> Widhi, M. N. C. 2018. Peran Pemerintah Thailand Dalam Menanggulangi Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Thailand. *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 4, hal 730-738

mengejutkan adalah angka eksploitasi anak dalam bentuk prostitusi yang meningkat. Tercatat angka yang semula 100.000-200.000 korban di tahun 2002 meningkat menjadi 800.000 korban di tahun 2011. Melihat fenomena ini, dunia internasional tidak dapat berdiam diri dan akhirnya masuklah ECPAT untuk membantu menurunkan angka eksploitasi anak. Setelah ECPAT masuk dan melakukan berbagai kegiatan dan membantu kebijakan pemerintah, angka Eksploitasi Seksual Komersil Turun menjadi kisaran 350.000-400.000 per tahun semenjak 2016-2020 dengan angka prostitusi anak berada di angka 3.500-4.500 di jangka waktu yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa ECPAT setidaknya berperan dalam mengurangi angka Eksploitasi Seksual, terutama pada anak. Angka-angka yang ditunjukkan pada tabel berikut membuktikan bahwa terjadi penurunan setelah peningkatan drastis yang dialami sebelumnya.

**Grafik 1 Angka Penurunan Eksploitasi Seksual Anak 2016-2020 di Thailand**



*Sumber: Heniawaty, N. 2020, diolah oleh penulis.*

Thailand hanyalah satu dari banyak negara di seluruh dunia yang melakukan *Child Sex Tourism*. Kemunculan ECPAT merupakan berkah bagi anak-anak sebagaimana ECPAT bertujuan untuk membela hak-hak asasi anak. Selain itu, perdagangan anak dan prostitusi

anak merupakan salah satu bentuk dari perbudakan modern. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Peran ECPAT dalam Menurunkan Tingkat Kasus Eksploitasi Seks Anak di Thailand Tahun 2016-2020

## **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai: Bagaimana Peran ECPAT Dalam Menurunkan Tingkat Kasus Eksploitasi Seks Anak di Thailand Tahun 2016-2020?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah, untuk Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimana peran ECPAT Dalam Menurunkan Tingkat Kasus Eksploitasi Seks Anak di Thailand Tahun 2016-2020.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, adapun manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut :

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dalam skripsi ini, penulis memiliki harapan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis. Tujuannya adalah memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi sumber informasi yang dapat digunakan sebagai acuan dan masukan bagi pembaca. Selain itu, penulis berharap bahwa hasil skripsi ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian di masa mendatang.



### 1.4.2 Manfaat Praktis

Dalam skripsi ini, terdapat manfaat praktis yang ingin dicapai penulis. Tujuannya adalah memberikan gambaran tentang latar belakang terjadinya peran ECPAT dalam menurunkan tingkat kasus eksploitasi seks anak di Thailand pada periode tahun 2016-2020. Selain itu, penulis berharap agar skripsi ini menarik bagi pembaca lain, sehingga mereka dapat menyadari bahwa di luar sana banyak saudara mereka yang membutuhkan bantuan akibat konflik kemanusiaan ini.

### 1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis memasukkan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian sebagai materi studi, masukan, dan perbandingan. Beberapa penelitian terdahulu yang termasuk dalam hal ini mencakup:

Pertama, Lestari, dkk (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “*Peran ECPAT Dalam Menangani CSEC Oleh Wisatawan Asing Di Thailand*” menjelaskan ECPAT, sebagai Pendorong, Pendidik, dan Mitra dalam upaya penanggulangan Child Sex Tourism di Thailand, menjalankan peran penting dalam menghadapi fenomena global penawaran CSEC melalui pariwisata negara ini kepada wisatawan asing. Dalam visi dan misinya, ECPAT memiliki komitmen untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari CSEC bagi anak-anak. Melalui strategi yang melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam penanganan CSEC, ECPAT berupaya mengemban peran sebagai Pendorong, Pendidik, dan Mitra.

Anak-anak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi fokus utama strategi perlindungan yang dilakukan oleh ECPAT, mengingat kerentanan mereka sebagai calon korban CSEC. Selain itu, sektor swasta pariwisata, Pemerintah Thailand, dan wisatawan asing juga mendapatkan pengawasan yang lebih ketat terkait fenomena CSEC ini.

Hal ini dilakukan dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan melindungi hak-hak anak dari eksploitasi seksual.

Dengan peran Katalis, Implementer, dan Mitra, ECPAT berperan dalam membawa perubahan positif melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Dalam hal ini, ECPAT menjadi sumber pengetahuan dan sumber dukungan untuk pemerintah, sektor pariwisata, dan masyarakat dalam upaya bersama melawan *CSEC*.

Kedua, merupakan Sheila Febrina dengan judul **Hambatan Pemerintah Thailand Dalam Mengatasi Eksploitasi Seksual Anak**. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif-Deskriptif dan menyimpulkan bahwa Pemerintah Thailand menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengatasi fenomena Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di dalam negeri. Tantangan ini dapat dikategorikan menjadi dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal terkait dengan ketidakmampuan penegak hukum dalam memberantas ESKA secara efektif di seluruh wilayah, sehingga fenomena ini terus berkembang dengan cepat. Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tidak memadai menjadi salah satu penyebab utama keberlanjutan ESKA di Thailand. Ketidakmampuan mengatasi permasalahan ini secara menyeluruh menciptakan celah bagi praktik eksploitasi seksual anak untuk terus berlangsung.

Di sisi lain, faktor eksternal terkait dengan fenomena migrasi yang masif ke Thailand. Banyak anak-anak yang berasal dari negara lain masuk ke Thailand dan menghadapi situasi terlantar. Pemerintah Thailand juga dihadapkan pada kebijakan yang rumit terkait pemberian status kewarganegaraan, sehingga imigran yang masuk ke negara ini seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dan menjadi rentan terhadap eksploitasi, terutama anak-anak.

Dalam rangka mengatasi tantangan ini, Pemerintah Thailand perlu mengambil tindakan yang tegas dan komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan dalam penegakan hukum yang melibatkan semua tingkatan pemerintahan dan instansi terkait. Selain itu, penting juga untuk memperkuat kebijakan perlindungan anak dan migrasi yang lebih inklusif, serta memastikan akses yang adil terhadap hak kewarganegaraan bagi imigran dan anak-anak terlantar.

Ketiga, Viska Nanda dengan penelitian berjudul **Efektivitas End Child Prostitution and Trafficking (ECPAT) Dalam Menangani Masalah Eksploitasi Seksual Anak Komersil di Thailand**. Penelitian ini melakukan evaluasi terhadap efektivitas ECPAT sebagai organisasi non-pemerintah internasional (INGO) dalam mengatasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Thailand. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ECPAT memiliki dampak positif yang signifikan dalam membantu pemerintah Thailand dalam mengurangi jumlah kasus ESKA. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa sebagai INGO, ECPAT memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan sepenuhnya masalah ini. Mereka tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak berperan sebagai lembaga pemerintah. Hal ini menjadi salah satu tantangan bagi ECPAT dan organisasi non-pemerintah lainnya dalam meningkatkan efektivitas upaya pengurangan ESKA di Thailand.

Selain itu, tantangan lainnya yang dihadapi adalah kebutuhan akan political will dari pemerintah Thailand sendiri. Tanpa dukungan dan keterlibatan aktif dari pemerintah, upaya penanggulangan ESKA akan sulit mencapai hasil yang optimal. Selain itu, ada pihak-pihak tertentu, termasuk aktor dan kelompok-kelompok dengan kepentingan terkait, yang dapat mendapatkan keuntungan dari keberadaan ESKA ini, yang juga menjadi hambatan dalam penanggulangan masalah ini. Dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan ESKA, penelitian ini merekomendasikan pentingnya kolaborasi antara ECPAT, pemerintah Thailand, dan aktor-aktor terkait lainnya. Diperlukan sinergi dan

kerjasama yang kuat untuk mencapai hasil yang signifikan dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual komersial di Thailand.

Penelitian diatas terdapat pada tabel berikut ini :

**Table 1 Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1	Nama Penulis	Eka Mulyani Lestari, I Made Anom Wiranata, S.IP., M.A., Putu Titah Kawitri Resen, S.IP., M.A
	Judul	Peran ECPAT Dalam Menangani CSEC Oleh Wisatawan Asing Di Thailand
	Nama Jurnal	Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
	Tahun	2015
	Hasil Penelitian	ECPAT memiliki peran sebagai <i>Catalyst, educator, and Partner</i> dalam penanganan <i>Child Sex Tourism</i> di Thailand. CSEC yang ditawarkan oleh pariwisata Thailand ke wisatawan asing merupakan fenomena yang sudah mendunia, bahkan hingga dijadikan promosi pariwisata Thailand. ECPAT, sebagaimana visi dan misinya, berusaha menciptakan lingkungan anak yang bebas dari CSEC. ECPAT, sebagai <i>Catalyst, educator, dan Partner</i> , menggunakan strategi yang menyasar dan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam usaha menangani CSEC. Anak-anak, baik domestik maupun asing, menjadi fokus utama dalam perlindungan strategi ECPAT sebagaimana mereka rentan menjadi korban. Selain itu, sektor privat pelaku pariwisata, Pemerintah Thailand, dan juga wisatawan asing di berlakukan pengawasan lebih ketat perihal fenomena CSEC.
	Perbandingan	Penelitian ini dapat dikatakan hampir sama dengan penelitian penulis. Perbedaan yang dapat dipertegas adalah bahwa penelitian penulis tidak terbatas pada peran ECPAT saja, melainkan meluas dengan membahas peran INGO secara umum. Selain itu, penulis tidak membatasi studi kasus pada satu negara saja. <i>Child Sex Tourism</i> juga tidak hanya terjadi oleh wisatawan asing, domestik juga.

2	Nama Penulis	Sheila Febrina
	Judul	Hambatan Pemerintah Thailand Dalam Mengatasi Eksploitasi Seksual Anak
	Nama Jurnal	Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
	Tahun	2017
	Hasil Penelitian	Pemerintah Thailand masih belum mampu menyelesaikan fenomena ESKA di tanah Thailand sendiri yang dikarenakan oleh dua faktor, yaitu Internal dan Eksternal. Faktor internal atau domestik berasal dari ketidakmampuan kekuatan penegak hukum untuk secara menyeluruh memberantas ESKA sehingga mereka terus bertumbuh layaknya jamur. Faktor Eksternalnya adalah masif nya migrasi ke Thailand yang menyebabkan banyak anak-anak yang masuk dan terlantarkan. Pemerintah Thailand merupakan pemerintah yang sangat sulit untuk memberikan status kewarganegaraan, maka dari itu para imigran yang masuk ke Thailand tidak memiliki perlindungan dari negara sehingga membuat mereka sangat rentan untuk dieksploitasi, terutama anak-anak.
	Perbandingan	Penelitian ini fokus pada peran ECPAT yang membantu mengurangi ESKA, terlepas dari kegagalan pemerintah Thailand . Berbeda dari penelitian sebelumnya di mana pemerintah Thailand bergerak sendiri. Penelitian ini juga membahas lebih dari sekedar Hambatan yang dialami oleh pemerintah Thailand.
3	Nama Penulis	Viska Nanda
	Judul	Efektivitas End Child Prostitution and Trafficking (ECPAT) Dalam Menangani Masalah Eksploitasi Seksual Anak Komersil di Thailand.
	Nama Jurnal	Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang
	Tahun	2021
	Hasil Penelitian	ECPAT sebagai INGO hanya dapat membantu dan tidak bisa menyelesaikan masalah dengan sendirinya karena tidak memiliki kapasitas legal dan bukan bersifat lembaga negara. Hal tersebut merupakan salah satu hambatan bagi ECPAT dan INGO lainnya dalam meningkatkan efektivitas pengurangan ESKA di

		Thailand. Hambatan lainnya adalah jika adanya political will dari Thailand itu sendiri dan juga adanya actor dan bahkan multiactor yang mendapatkan untung dari adanya ESKA ini.
	Perbandingan	Penelitian sebelumnya membahas efektivitas dari kehadiran ECPAT, sedangkan penelitian ini membahas sesuatu yang lebih luas dan lebih lawas dari efektivitas, yaitu peran dari ECPAT itu sendiri di Thailand.

## 1.6 Kerangka Konseptual

### 1.6.1 International Non-Governmental Organizations (INGO)

Definisi International Non-Governmental Organizations (INGO) masih menjadi perdebatan dan belum sepenuhnya dipastikan karena adanya perbedaan pendapat dan ketidakpastian dalam mencapai kesepakatan mengenai definisi tersebut. Karns dan Mingst, dalam pandangan mereka, mengajukan definisi INGO sebagai organisasi yang terdiri dari individu atau asosiasi yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama, terutama dalam konteks kemanusiaan.<sup>5</sup> Penting untuk mencatat bahwa definisi ini hanya salah satu dari berbagai pendekatan yang ada dalam merumuskan konsep INGO. Terdapat berbagai definisi lain yang diajukan oleh berbagai ahli dan organisasi, yang sering kali mencerminkan perbedaan dalam fokus, tujuan, dan sifat organisasi tersebut.

Perdebatan dan ketidakpastian dalam definisi INGO menunjukkan kompleksitas dan keragaman karakteristik organisasi semacam ini. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, penting bagi para pemangku kepentingan untuk terus berdiskusi dan berkolaborasi guna mencapai pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran, fungsi, dan dampak INGO dalam masyarakat global. Namun, dalam bukunya yang berjudul "The Management of Non-Governmental Organizations", David Lewis dan Nazneen Kanji memberikan definisi yang

---

<sup>5</sup> Karns, M.P & Mingst, K.A. (2004). International Organizations: The Politics and Perception of Global Governance. London: Lynne Rienner Publishers, h.3



berbeda mengenai International Non Governmental Organizations (INGO). Mereka menggambarkan INGO sebagai solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah.<sup>6</sup> INGO juga menjadi pemain utama dalam sektor ketiga dalam bidang pembangunan, hak asasi manusia, aksi kemanusiaan, lingkungan, dan bidang lain dalam aktivitas publik. INGO dapat didefinisikan sebagai "asosiasi sukarela" yang peduli untuk mengubah suatu lingkungan tertentu menjadi lebih baik.

Dalam pandangan Salamon dan Anheier yang dikutip oleh Amagoh (2015), INGO dapat dibedakan berdasarkan sifat, orientasi, dan tingkat kegiatannya. Sifat-sifat INGO yang konsisten dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, INGO berdiri secara independen dari negara, menjunjung tinggi otonomi organisasi. Kedua, kegiatan INGO lebih berfokus pada advokasi dan independen dari campur tangan pemerintah. Ini tidak berarti bahwa INGO tidak bekerja sama dengan pemerintah, tetapi mereka berperan sebagai mitra bukan bawahan pemerintah. Ketiga, INGO adalah organisasi nirlaba yang menggunakan pendapatan untuk biaya operasional dan jika ada kelebihan, dialokasikan untuk program sumbangan. Keempat, keanggotaan dan aktivitas INGO bersifat sukarela, melibatkan individu dan kelompok yang memiliki minat dan komitmen terhadap tujuan organisasi. Terakhir, bentuk dan fungsi INGO didasarkan pada cita-cita ideal, seperti lingkungan, hak asasi manusia, demokrasi, dan sebagainya.

Dalam hal orientasi, terdapat enam kategori orientasi INGO yang dapat diidentifikasi, yaitu kesejahteraan, pembangunan, penelitian, pendidikan, jaringan, dan advokasi. Setiap kategori ini mencerminkan fokus utama kegiatan dan tujuan yang ingin dicapai oleh INGO. Selanjutnya, dalam hal tingkat kegiatan, INGO dapat beroperasi di berbagai tingkatan komunitas, mulai dari tingkat lokal, nasional, hingga internasional.

---

<sup>6</sup> Lewis, D. K & Kanji, N. (2001). *The Management of Non-Governmental Organizations*. London: Routledge, h.30

Tingkat kegiatan ini mencerminkan skala dan cakupan dari upaya yang dilakukan oleh INGO untuk mencapai tujuan dan dampak yang diinginkan. Dengan pemahaman tentang sifat, orientasi, dan tingkat kegiatan INGO, kita dapat melihat keragaman dan kompleksitas peran dan kontribusi INGO dalam konteks global.<sup>7</sup>

Perkembangan International Non Governmental Organizations (INGO) selama abad ke-20 dapat dikelompokkan menjadi tiga generasi yang berbeda, sesuai dengan pandangan yang diajukan oleh Korten.

Generasi pertama INGO berfokus pada memberikan bantuan dan kesejahteraan, terutama dalam situasi darurat. Pada periode ini, INGO lebih banyak berperan sebagai penyedia bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Mereka bergerak cepat untuk merespons bencana alam, konflik bersenjata, dan situasi krisis lainnya. Tujuan utama mereka adalah memberikan bantuan dan pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban yang terkena dampak.

Generasi kedua INGO mengubah pendekatannya dengan lebih berfokus pada membangun komunitas lokal yang mandiri. Mereka terlibat dalam upaya pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan, dengan fokus pada sektor kesehatan, pertanian, infrastruktur lokal, pendidikan, dan sektor lainnya. INGO pada generasi ini bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk mengembangkan kapasitas lokal dan memberdayakan mereka agar dapat mengelola sumber daya dan memperbaiki kondisi hidup mereka.

Generasi ketiga INGO menempatkan perhatian pada pembangunan sistem yang berkelanjutan. Mereka mengakui bahwa perubahan nyata memerlukan transformasi struktural dan kebijakan yang lebih luas. INGO pada generasi ini bekerja untuk mendorong perubahan sosial, keadilan, dan transformasi sistem yang lebih inklusif. Mereka

---

<sup>7</sup> Amagoh, F. (2015). Improving the Credibility and Effectiveness of Non-Governmental Organizations. *Progress in Development Studies*, 15 (3), 221-222

berkolaborasi dengan pemerintah, sektor swasta, organisasi internasional, dan kelompok masyarakat lainnya untuk mencapai perubahan struktural yang lebih besar.

Melalui evolusi ini, INGO telah mengalami perkembangan signifikan dalam peran dan fokus kerjanya. Dari memberikan bantuan darurat hingga membangun komunitas lokal yang mandiri, hingga mendorong transformasi sistem yang berkelanjutan, INGO terus beradaptasi untuk menghadapi tantangan dunia yang terus berubah.

Sejak awal kemunculannya, INGO telah mengalami peningkatan aktivitas, jangkauan, fungsi, dan peran. Perkembangan ini telah membawa berbagai tuntutan yang harus dihadapi oleh INGO. Dalam menjalankan peran mereka, INGO harus menghadapi tantangan seperti meningkatnya kompleksitas masalah global, persaingan dengan organisasi lain, kebutuhan untuk mencapai keberlanjutan dalam program-program mereka, dan adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi.

Dalam menghadapi tantangan ini, INGO terus beradaptasi dan mengembangkan strategi yang inovatif. Mereka bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, membangun jaringan kerja, dan berkolaborasi dengan organisasi lain untuk mencapai tujuan mereka. INGO juga berusaha untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan internal mereka, termasuk dalam bidang manajemen, keuangan, dan pengawasan program. Dengan demikian, INGO telah menjadi pemain penting dalam arena global, memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mempromosikan pembangunan berkelanjutan, penanggulangan bencana, pemajuan hak asasi manusia, dan berbagai isu kemanusiaan lainnya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Korten, D.C. (1987). *Third Generation NGO Strategies: A Key to People Centered Development*. *World Development*, 15 (1), 147-149

Menurut Jeffrey Unerman dan O'Dwyer, International Non Governmental Organizations (INGO) dihadapkan pada berbagai tuntutan seperti akuntabilitas, legitimasi, efektivitas kinerja, dan keberlanjutan. INGO memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap para pemangku kepentingan untuk menjalankan akuntabilitas mereka. Kegagalan dalam memenuhi tuntutan akuntabilitas dapat mengancam legitimasi dan kelangsungan hidup INGO. Oleh karena itu, INGO harus mampu menyediakan informasi yang transparan dan terpercaya kepada para pemangku kepentingan, termasuk donor, pemerintah, masyarakat, dan kelompok yang mereka bantu.

Selain itu, INGO juga harus menjaga efektivitas kinerja mereka dalam mencapai tujuan dan misi organisasi. Mereka perlu memastikan bahwa program dan proyek yang dilaksanakan memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat yang mereka layani. Evaluasi dan pemantauan yang sistematis diperlukan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi area perbaikan. Keberlanjutan INGO juga menjadi tuntutan penting. Organisasi ini perlu memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk terus beroperasi dan memberikan kontribusi yang berkelanjutan dalam upaya mereka. Mereka harus mengembangkan strategi penggalangan dana yang efektif, membangun kemitraan jangka panjang, dan mengelola sumber daya dengan bijaksana.

Dalam menghadapi tuntutan ini, INGO harus terus beradaptasi dan mengembangkan keahlian mereka. Mereka perlu meningkatkan kapasitas internal, memanfaatkan teknologi dan inovasi, serta berkolaborasi dengan organisasi lain untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dengan demikian, INGO dapat mempertahankan legitimasi mereka, memberikan kontribusi yang berarti dalam pemecahan masalah global, dan mencapai tujuan kemanusiaan yang mereka anut.<sup>9</sup> Untuk tetap bertahan, INGO memiliki dua opsi, yaitu "perform or perish".

---

<sup>9</sup> Unerman, J. & O'Dwyer, B. (2006). On James Bond and the importance of NGO accountability. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 19 No. 3., 305-318.

Dalam hal ini, menjadi akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan menjadi kunci utama bagi INGO.

Dikatakan bahwa INGO harus mampu menunjukkan kinerja yang efektif dan memberikan hasil yang nyata dalam upaya mereka. Ini berarti bahwa INGO harus dapat mengukur dan melaporkan dampak dari program dan proyek mereka, serta memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan transparan. Dengan menjadi akuntabel, INGO dapat membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan, termasuk donor, pemerintah, dan masyarakat yang mereka layani. Melalui pelaporan yang terbuka dan transparan, INGO dapat memberikan bukti tentang penggunaan dana yang tepat dan hasil yang dicapai.

Selain itu, akuntabilitas juga berarti bahwa INGO harus mengikuti standar dan prinsip-prinsip etika dalam *implementeran* pekerjaan mereka. Mereka harus mematuhi kode etik, memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta menghormati kebudayaan dan nilai-nilai setempat dalam kerja mereka. Dalam dunia yang terus berubah dan semakin kompleks, INGO harus terus beradaptasi dan meningkatkan praktik akuntabilitas mereka. Mereka harus mengambil pelajaran dari pengalaman, berinovasi dalam pendekatan mereka, dan mengatasi tantangan yang muncul.

Dengan demikian, INGO dapat menjaga keberlanjutan dan relevansi mereka dalam menjalankan peran mereka dalam membawa perubahan positif di dunia ini. Dalam era di mana pemangku kepentingan semakin menuntut transparansi dan pertanggungjawaban, menjadi akuntabel adalah kunci untuk tetap menjadi kekuatan yang efektif dan berkelanjutan dalam mempromosikan kebaikan dan memperjuangkan keadilan sosial.

### 1.6.2 Peran International Non-Governmental Organizations (INGO)

Menurut definisi David Lewis dan Nazneen Kanji dalam bukunya "The Management of Non-Governmental Development Organization," INGO dianggap sebagai solusi baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Mereka berpendapat bahwa INGO memiliki tiga peran utama sebagai sebuah organisasi, yaitu pelayanan atau implementer, katalis, dan kemitraan.

Peran pertama, yaitu sebagai pelayanan atau implementer, mengacu pada kemampuan INGO untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebagai implementer, INGO dapat melakukan proyek-proyek lapangan, memberikan bantuan, atau menyediakan layanan khusus seperti pendidikan, kesehatan, atau bantuan darurat. Dalam peran ini, INGO bertindak sebagai *implementer* program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Peran kedua adalah sebagai katalis. Sebagai katalis, INGO berfungsi sebagai agen perubahan yang mendorong perubahan sosial, kebijakan, atau praktik-praktik yang lebih baik. Mereka dapat mengadvokasi untuk hak asasi manusia, mengkampanyekan isu-isu penting, atau melobi pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif. Dalam peran ini, INGO berusaha untuk mengubah kondisi sosial yang tidak adil atau merugikan.

Peran ketiga adalah sebagai kemitraan. Dalam peran ini, INGO bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi internasional, dan kelompok masyarakat lokal. Mereka menjalin kemitraan strategis untuk mencapai tujuan bersama dan memperkuat upaya pembangunan. Dalam peran ini, INGO berperan sebagai mediator antara berbagai aktor dan memfasilitasi kerjasama yang saling menguntungkan.

Sebuah INGO dapat menjalankan salah satu peran tersebut, tergantung pada tujuan, mandat, dan strategi organisasi. Namun, banyak INGO juga menggabungkan ketiga peran ini dalam upaya mereka untuk mencapai dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Melalui kombinasi peran ini, INGO berusaha untuk menjadi agen perubahan yang efektif dalam menyelesaikan masalah sosial dan pembangunan.

### 1. *Implementer*

Dalam konteks INGO, peran *implementer* terkait dengan upaya untuk mengumpulkan sumber daya dan menyediakan barang dan jasa kepada individu yang membutuhkannya. Peran ini bertujuan untuk mendukung isu-isu penting seperti kesehatan, pertanian, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. INGO berfungsi sebagai penyedia langsung yang berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan isu-isu tersebut.

Sebagai penyedia langsung, INGO berperan dalam mengorganisir proyek-proyek lapangan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan langsung kepada individu atau kelompok yang membutuhkan. Mereka dapat menyediakan layanan kesehatan seperti vaksinasi, perawatan medis, atau penyuluhan kesehatan. Selain itu, INGO juga dapat memberikan bantuan dalam bidang pertanian, seperti penyuluhan pertanian, pelatihan, atau pendampingan untuk meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat.

Peran *implementer* INGO juga dapat terkait dengan penegakan hak asasi manusia. Mereka dapat memberikan bantuan dan perlindungan kepada individu yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia, termasuk korban kekerasan, diskriminasi, atau eksploitasi. Selain itu, INGO juga dapat terlibat dalam upaya

konservasi lingkungan hidup dengan menyediakan sumber daya, pelatihan, atau kampanye kesadaran untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan.

Melalui peran *implementer* ini, INGO berusaha untuk memberikan solusi konkret bagi masalah sosial dan pembangunan yang dihadapi oleh masyarakat. Mereka berperan sebagai agen yang memberikan bantuan langsung, membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan kondisi hidup mereka. Dalam melakukan tugas ini, INGO bekerja sama dengan masyarakat setempat, mitra, dan pemerintah untuk mencapai dampak yang berkelanjutan.

Dalam upaya ini, INGO melakukan berbagai kegiatan, seperti mengumpulkan dana dari donatur, menggalang dukungan dan kesadaran masyarakat, dan bekerja sama dengan pemerintah dan mitra lokal. INGO juga dapat melakukan proyek dan program untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, seperti membangun fasilitas kesehatan, memberikan bantuan pangan, menyediakan pendidikan, melakukan advokasi, dan lain sebagainya.

Melalui peran ini, INGO berusaha untuk memberikan kontribusi positif dalam memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di berbagai daerah. Mereka bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang mereka layani. Namun, dalam melaksanakan peran *implementer* ini, INGO juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Mereka harus menghadapi keterbatasan sumber daya, tantangan keberlanjutan program, masalah koordinasi dengan pihak lain, dan berbagai faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi keberhasilan upaya mereka.

Dalam menghadapi tantangan ini, INGO harus terus beradaptasi dan mengembangkan pendekatan yang efektif. Mereka harus bekerja secara kolaboratif,



melibatkan komunitas setempat, dan memastikan partisipasi yang berkelanjutan dari masyarakat yang mereka layani. Dengan menjalankan peran *implementer* ini dengan baik, INGO dapat berkontribusi secara signifikan dalam menyelesaikan masalah sosial dan mendorong perubahan positif. Melalui upaya mereka, INGO dapat memberikan bantuan yang diperlukan kepada individu dan komunitas yang membutuhkan, serta berperan dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan adil.<sup>10</sup>

Fleksibilitas dalam memberikan program merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh International Non-Governmental Organizations (INGO). Mereka memiliki opsi untuk mengembangkan dan menjalankan program-program sesuai dengan kebutuhan dan prioritas mereka sendiri, atau mengikuti program yang telah disepakati dalam perjanjian dengan mitra kerja seperti pemerintah atau donatur.

Hal ini memungkinkan INGO untuk beradaptasi dengan perubahan situasi atau kondisi di lapangan, dan memberikan respons yang lebih efektif terhadap kebutuhan masyarakat yang mereka layani. Dalam konteks ini, INGO memiliki fleksibilitas dalam menentukan fokus dan pendekatan program mereka, serta menggunakan pendekatan yang sesuai dengan konteks dan kondisi lokal.

Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh INGO tidak terbatas hanya pada pihak dengan siapa mereka bekerja sama dalam perjanjian kerja. Mereka juga dapat melibatkan faktor-faktor lain atau melakukan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan bersama yang telah disepakati. Misalnya, INGO dapat menyelenggarakan

---

<sup>10</sup> Lewis, D. K & Kanji, N. (2001). *The Management of Non-Governmental Organizations*. London: Routledge, h.69

pelatihan atau penelitian bagi pemerintah, sektor swasta, atau masyarakat umum untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman dalam isu-isu yang mereka hadapi.

Dengan memiliki fleksibilitas ini, INGO dapat merespons kebutuhan yang beragam dan kompleks dalam konteks kerja mereka. Mereka dapat mengadaptasi program-program mereka sesuai dengan perubahan lingkungan, memanfaatkan kesempatan baru, dan meningkatkan dampak yang dihasilkan. Fleksibilitas ini juga memungkinkan INGO untuk menjalin kemitraan yang lebih luas dan memperluas jangkauan serta dampak dari upaya mereka dalam mencapai tujuan bersama yang lebih besar.

## **2. Katalis**

Peran kedua yang dimiliki oleh International Non-Governmental Organizations (INGO), menurut Lewis dan Kanji, adalah sebagai katalis. Dalam konteks ini, katalis dapat diartikan sebagai entitas atau faktor yang memicu perubahan. Peran katalis merupakan salah satu kemampuan yang dimiliki oleh INGO untuk mendorong dan mempengaruhi proses perubahan dalam masyarakat atau dalam sektor pembangunan yang lebih luas.

Sebagai katalis, INGO dapat mengambil peran aktif dalam merangsang perubahan positif dan mengatasi masalah yang ada. Mereka dapat berfungsi sebagai pihak yang menginspirasi, mendorong, dan membantu melibatkan individu atau kelompok dalam masyarakat setempat. Dengan membangun kesadaran, memberikan informasi, dan memberikan akses terhadap sumber daya atau peluang baru, INGO dapat memberikan dorongan yang dibutuhkan untuk memulai atau mempercepat perubahan yang diinginkan. Selain itu, peran katalis INGO juga dapat diarahkan kepada aktor lain dalam pembangunan, seperti pemerintah, bisnis, atau donor.

Mereka dapat memainkan peran strategis dalam merangkul dan mempengaruhi kebijakan, praktek, atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak ini. Melalui dialog, advokasi, atau kolaborasi, INGO dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan yang diambil oleh aktor-aktor tersebut, sehingga menciptakan perubahan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dalam kedua peran ini, sebagai penyedia langsung dan katalis, INGO memiliki potensi untuk menciptakan dampak positif yang signifikan. Dengan menggabungkan keahlian, pengalaman, dan jaringan mereka, INGO dapat menjadi kekuatan penggerak dalam mempromosikan perubahan sosial, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mereka layani.<sup>11</sup>

INGO memiliki kemampuan untuk memberikan inspirasi, fasilitasi, atau kontribusi dalam mendorong pemikiran dan tindakan yang berorientasi pada perubahan. Dalam hal ini, mereka dapat melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membangun organisasi dan membentuk kelompok yang dapat bekerja bersama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, INGO juga dapat terlibat dalam upaya pemberdayaan berbasis gender, di mana mereka mendukung peran perempuan dan mendorong kesetaraan gender dalam masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan ini, INGO berupaya untuk memberikan ruang dan peluang kepada perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pengaruh di berbagai sektor kehidupan.

---

<sup>11</sup> Lewis, D. K & Kanji, N. (2001). *The Management of Non-Governmental Organizations*. London: Routledge, h.71

Selanjutnya, INGO dapat melibatkan diri dalam kegiatan lobi dan advokasi untuk mempengaruhi kebijakan dan praktek yang ada. Dengan melakukan pendekatan ini, mereka berusaha mempengaruhi pemikiran dan tindakan para pembuat kebijakan, serta mengadvokasi perlunya perubahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, INGO juga dapat terlibat dalam kegiatan pembelajaran dan tindakan, di mana mereka berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dengan individu dan kelompok lain untuk meningkatkan pemahaman dan memperluas kapasitas mereka dalam mengatasi isu-isu yang ada.

Terakhir, INGO dapat melakukan upaya dalam mempengaruhi kebijakan yang lebih luas melalui inovasi dan kewirausahaan kebijakan. Dengan menciptakan solusi baru, mengidentifikasi peluang, dan mempromosikan pendekatan yang inovatif dalam merespon isu-isu yang kompleks, INGO berkontribusi dalam membentuk lingkungan kebijakan yang lebih responsif dan efektif. Melalui rangkaian kegiatan ini, INGO berperan dalam mendorong pemikiran dan tindakan yang berorientasi pada perubahan, dengan tujuan mencapai dampak positif dan berkelanjutan dalam masyarakat yang mereka layani.

### **3. Partner**

Peran terakhir yang dijelaskan oleh Lewis dan Kanji adalah peran INGO sebagai mitra (partners). Sebagai mitra, INGO bekerja sama dengan aktor lain dan melakukan perencanaan risiko bersama dengan mitra mereka. Peran ini mencerminkan tren saat ini di mana INGO menjalin kerja sama dengan pemerintah, donor, dan sektor swasta dalam kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang sama.

Dalam peran sebagai mitra, INGO dapat memberikan kontribusi khusus dalam program lembaga multi atau proyek tertentu. Mereka bekerja sama dengan

mitra lain untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau proyek yang kompleks. Melalui kerja sama ini, INGO dan mitra mereka berbagi sumber daya, pengalaman, dan kepakaran untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selain itu, sebagai mitra, INGO berperan dalam membangun hubungan kerja yang saling menguntungkan dengan pemerintah, donor, dan sektor swasta. Mereka berkolaborasi untuk merancang strategi, memobilisasi sumber daya, dan mengelola risiko bersama. Mitra kerja ini saling mendukung dan melengkapi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Peran INGO sebagai mitra mencerminkan pentingnya kerja sama dan kolaborasi dalam menghadapi tantangan global yang kompleks. Dengan menjalin kemitraan yang kuat, INGO dapat memperluas dampak dan mencapai hasil yang lebih berkelanjutan dalam upaya pembangunan dan kemanusiaan.

Dalam kesimpulannya, INGO memiliki peran penting sebagai mitra dalam kerja sama dengan aktor lain, dengan tujuan mencapai hasil yang lebih baik melalui kontribusi khusus dalam program lembaga multi atau proyek tertentu.<sup>12</sup> Melalui interaksi antara INGO dan masyarakat, terdapat kegiatan yang dikenal sebagai "pengembangan kapasitas" yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan individu maupun kelompok. Kegiatan ini melibatkan transfer pengetahuan, pelatihan, dan pendampingan untuk membantu masyarakat memperoleh pengetahuan baru, meningkatkan kemampuan teknis, dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan konteks mereka.

Pengembangan kapasitas dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran dan pengembangan. INGO bertindak sebagai fasilitator dan penyedia sumber daya yang

---

<sup>12</sup> Lewis, D. K & Kanji, N. (2001). *The Management of Non-Governmental Organizations*. London: Routledge, h.74

mendukung masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi upaya pengembangan kapasitas.

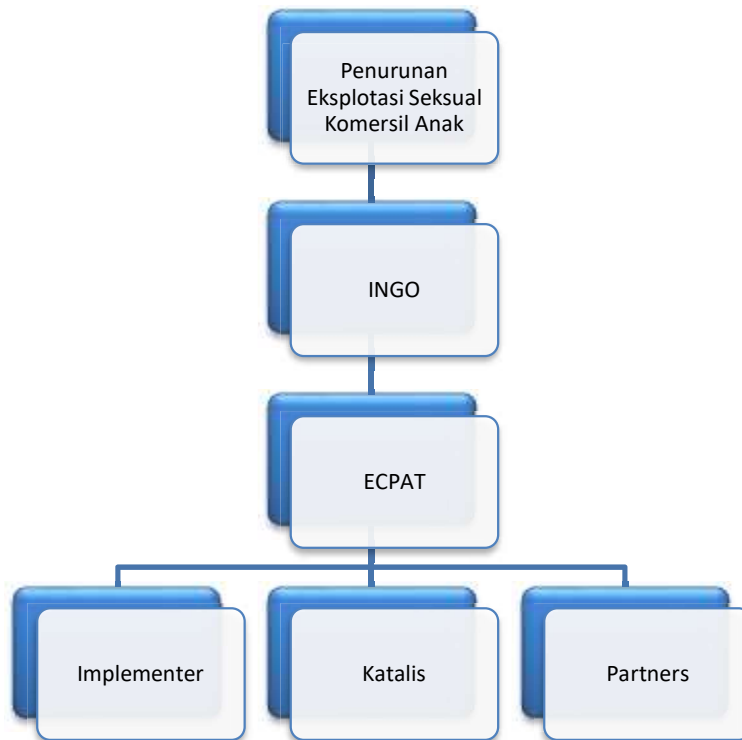
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat masyarakat dalam mengatasi tantangan dan mengambil peran aktif dalam pembangunan mereka sendiri. Dengan meningkatkan kapasitas individu dan kelompok, diharapkan masyarakat dapat mengatasi masalah yang mereka hadapi, meningkatkan kemandirian, dan mencapai perubahan positif dalam kehidupan mereka.

Interaksi antara INGO dan masyarakat dalam kegiatan pengembangan kapasitas merupakan bagian penting dari upaya pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memberdayakan masyarakat melalui transfer pengetahuan dan keterampilan, INGO berperan dalam memperkuat kapasitas dan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam rangka mencapai hasil yang lebih baik, penting bagi INGO untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengembangan kapasitas. Ini mencakup pendekatan partisipatif, pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Secara keseluruhan, melalui kegiatan pengembangan kapasitas, INGO berinteraksi dengan masyarakat untuk memperkuat kemampuan mereka dalam mengatasi tantangan dan meraih perubahan positif.

## 1.7 Alur Pemikiran

**Gambar 1 Alur Pemikiran**



## 1.8 Argumentasi Utama/ Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, argumentasi utama penulis terhadap **“Peran Ecpat Dalam Menurunkan Tingkat Kasus Eksploitasi Seks Anak Di Thailand Tahun 2016-2020”** adalah berupa:

Dalam peran pertama, ECPAT bertindak sebagai *implementer*, yang melibatkan *implementeran* kebijakan pemerintah Thailand dan program-program internal ECPAT sendiri. Dalam hal ini, ECPAT berperan dalam melibatkan massa dan menyediakan barang dan jasa pendukung sesuai dengan tujuan organisasi.

Dalam peran kedua, ECPAT berperan sebagai katalis atau pencetus, yang berarti organisasi ini memperkenalkan perubahan atau gerakan baru dalam suatu fenomena. Dalam peran ini, ECPAT menginspirasi, memfasilitasi, dan mempromosikan perubahan dengan

tujuan mengatasi eksploitasi seksual anak. ECPAT bekerja untuk menciptakan kesadaran, mengedukasi masyarakat, dan memobilisasi tindakan yang dapat menghentikan dan mencegah eksploitasi seksual anak.

Peran ketiga ECPAT adalah sebagai mitra, di mana ECPAT bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat Thailand, dan korban untuk mengurangi angka eksploitasi seksual anak. Dalam peran ini, ECPAT menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat/daerah, lembaga publik, LSM, dan membentuk jaringan. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan strategi yang holistik dan efektif dalam penanggulangan eksploitasi seksual anak di Thailand.

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Desain Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kejadian, fakta, keadaan, dan fenomena yang terjadi selama penelitian mengenai "Peran ECPAT Dalam Memerangi Human Trafficking dan Child Sex Tourism". Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menjelajahi dan memahami makna yang terkait dengan individu atau kelompok yang terlibat dalam masalah sosial atau kemanusiaan tersebut. Pendekatan kualitatif bersifat induktif, dengan penekanan pada pemahaman makna individual dan upaya untuk menguraikan kompleksitas suatu masalah.<sup>13</sup> Tanpa melakukan campur tangan atau perubahan terhadap variabel yang diteliti, penelitian dengan pendekatan deskriptif ini berfokus pada pemahaman yang komprehensif tentang perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan aspek lainnya. Metode

---

<sup>13</sup> Creswell, J. W. (2014). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. YOGYAKARTA : PUSTAKA PELAJAR



ini menggambarkan fenomena dengan menggunakan kata-kata dan bahasa dalam konteks yang alami, serta melibatkan berbagai metode yang alami.

### **1.9.2 Unit Analisis**

Unit Analisis dalam penelitian ini adalah Organisasi yaitu ECPAT. Peneliti menganalisis peran nyata ECPAT dalam membrantas *Human Trafficking* dan *Child Sex Tourism*.

### **1.9.3 Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan data. Data yang akan dikumpulkan terdiri dari ekspresi dalam bentuk kata-kata dan gambar. Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah metode sekunder. Data sekunder ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti surat kabar, jurnal, dan informasi yang ditemukan melalui pencarian online.

Penulis akan mencari dokumen-dokumen yang relevan dan mengumpulkan informasi dari sumber-sumber sekunder tersebut. Data sekunder ini akan digunakan sebagai pendukung bagi data primer yang dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti akan mengamati dan menganalisis dokumen-dokumen tersebut, mencatat pola-pola, informasi penting, dan mengidentifikasi temuan yang relevan dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis akan memanfaatkan keuntungan data sekunder untuk menyusun dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder akan menjadi sumber yang berharga untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang diteliti. Dengan menggabungkan data primer dan data sekunder, penulis akan dapat menyajikan hasil penelitian yang komprehensif dan mendalam.

#### 1.9.4 Fokus Penelitian

**Table 2 Fokus Penelitian**

Variabel	Dimensi	Indikator
Peran <i>International Non Governmental Organization</i> , ECPAT, dalam menurunkan Child Sex Tourism	<i>Implementer</i>	1. Memobilisasi Massa 2. Penyedia barang dan jasa sebagai penunjang
	<i>Catalyst</i>	1. Menginspirasi 2. Memfasilitasi 3. Mempromosikan Perubahan
	<i>Partners</i>	1. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak (Pemerintah pusat/daerah, lembaga publik, LSM.) 2. Membuat Jaringan

#### 1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

##### a. *Library Research*

Pada penelitian ini, penulis mengadopsi teknik Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari serta menganalisis buku teks, jurnal ilmiah, artikel berita yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### 1.9.6 Teknik Keabsahan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Teknik Trigulasi, yaitu sebagai berikut :

##### a. **Triangulasi Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai metode pengumpulan data. Teknik ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda untuk memperoleh sudut pandang yang lebih komprehensif. Peneliti akan mengumpulkan data dari dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah,

catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi, serta gambar atau foto. Dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, penulis dapat memperoleh beragam perspektif dan informasi yang saling melengkapi. Data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut akan dianalisis secara komprehensif untuk mengidentifikasi temuan dan pola-pola yang relevan dengan tujuan penelitian.

Penggunaan teknik triangulasi sumber memungkinkan penulis untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan membandingkan dan memadukan data dari berbagai sumber, penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik penelitian dan mendapatkan hasil yang lebih akurat. Dengan demikian, penggunaan teknik triangulasi sumber dalam penelitian ini akan membantu penulis untuk mengumpulkan data yang beragam dan valid, serta meningkatkan keandalan hasil penelitian.

### **1.9.7 Teknik Analisis Data**

Penulis akan menggunakan teknik analisis data kualitatif setelah selesai mengumpulkan data. Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang sistematis, penulis dapat menggali makna dan pemahaman yang lebih dalam dari data yang telah dikumpulkan. Hal ini akan membantu penulis dalam menghasilkan temuan yang bermakna dan relevan dengan tujuan penelitian. Proses analisis data kualitatif akan melibatkan tiga tahap sebagai berikut:

#### **a. Tahap Reduksi Data**

Pada tahap ini, penulis akan memperkecil volume data yang telah dikumpulkan dengan mengorganisasi, mengklasifikasi, dan memilih data yang

relevan dengan tujuan penelitian. Data akan diubah menjadi format yang lebih terkelola agar dapat dianalisis lebih lanjut.

**b. Tahap Penyajian Data**

Tahap ini melibatkan penyajian data yang telah direduksi dalam bentuk yang lebih terstruktur dan terorganisir, seperti tabel, diagram, atau tema yang diidentifikasi. Hal ini akan membantu penulis dalam menggali informasi lebih dalam dan menemukan pola atau hubungan antara data yang diperoleh.

**c. Tahap Penarik Kesimpulan**

Pada tahap ini, penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan tersebut akan dikaitkan dengan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian yang diajukan. Selain itu, penulis juga akan memverifikasi kesimpulan yang diperoleh melalui perbandingan dengan data yang telah dikumpulkan sebelumnya dan literatur yang relevan.

**1.9.8 Jadwal Penelitian**

Berikut merupakan jadwal *implementeran* penelitian dari awal mulai hingga selesai penarikan kesimpulan:

**Table 3 Jadwal Peneltian**

Rencana Kegiatan	Waktu <i>Implementeran</i>						
Penyusunan Proposal Penelitian							
a. Pengumpulan data awal							
b. Bimbingan proposal penelitian							
c. Seminar Proposal							

d. Perbaikan isi proposal skripsi							
Penyusunan Skripsi							
a. Pengumpulan dan analisis data penelitian							
b. Penyusunan skripsi							
c. Bimbingan ke dosen							
d. Ujian komperhensif							
e. Perbaikan isi skripsi							

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, M., & Baghdasaryan, K. (2015). *The Age of Free Will and Human Values: Sex Tourisms Evolution and Its Impact. Thesis. Centria University of Applied Science.*
- Amagoh, F. (2015). Improving The Credibility and Effectiveness of Non-Governmental Organizations. *Progress in Development Studies, 221-222.*
- Cresswell, J. W. (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.* Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Development, D. o. (2021). *The Situation of Child Exploitation in Thailand.* Development, Department of Women's Affairs and Family.
- ECPAT FOUNDATION. (2012). *Child Protection Policy.* Thailand.
- ECPAT International. (2016). *Global Monitoring, Thailand.* Retrieved from ECPAT International.
- ECPAT International. (2018). *ECPAT International Annual Report July 2017 - June 2018. Thailand.* Retrieved from ECPAT International.
- ECPAT Thailand. (2020). *ECPAT Thailand 2019 Annual Report.* Retrieved from ECPAT Thailand: [https://www.ecpat.or.th/uploads/annual\\_report/ECPAT\\_Thailand\\_Annual\\_Report\\_2019\\_EN.pdf](https://www.ecpat.or.th/uploads/annual_report/ECPAT_Thailand_Annual_Report_2019_EN.pdf).
- ECPAT Thailand. (2020). *Our Work.* Retrieved from ECPAT Thailand: <https://www.ecpat.or.th/our-work/>.
- ECPAT Worldwide. (2023, 2 23). *ECPAT Thailand.* Retrieved from ECPAT Worldwide: <http://www.ecpat.org/where-we-work/>
- Ekoluoma, M. (2017). *Everyday Life in a Philippine Sex Tourism Town. Dissertation. Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Box 631, Uppsala University.*
- Guanzon, & Calalang. (2017). *The Anti-Trafficking in Person Act 2003, Issues and Problems. Harvard University.*
- Hechler, D. (1995). *Child Sex Tourism.* The National Law Journal.
- Heniwaty, N. (2020). *Upaya ECPAT dalam menangani Eksploitasi Seksual Anak dalam Perjalanan dan Pariwisata (ESAPP) di Thailand. Universitas Katolik Parahyangan.*
- Hickey, & Eric W. (2006). *Sex Crimes and Paraphilia.* California: Pearson Education.
- Karns, M. P., & Mingst, K. A. (2004). *International Organizations: The Politics and Perception of Global Governance.* London: Lynne Rienner Publishers.
- Korten, D. (1987). *Third Generation NGO Strategies: A Key to People Centered Development. World Development, 147-149.*

- Lestari, Wiranata, & Resen. (2015). Peran ECPAT Dalam Menangani Csec Oleh Wisatawan Asing Di Thailand. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana*.
- Lewis, D., & Kanji, N. (2004). *The Management of Non-Governmenta Organizations*. London: Routledge.
- Millatina, A. (2018). Peran ECPAT Dalam Menangani Eksploitasi Seksual Koersial Anak di Indonesia. *Journal of International Relations*, 536-546.
- Montgomery, H. (2001). *Child Sex Tourism in Thailand. Tourism and the Less Developed World: Issues and Case Studies*. CAB Publisher.
- Orndorf, M. (2010). Evedentiary and Procedural Hurdles og the PROTECT Act. *Journal of The Secret World of Child Sex Tourism*, 9.
- Rachdana, I. (2017). *Catatan ECPAT Indonesia Tahun 2017: 404 Anak Menjadi Korban ESKA*.
- Rahamdanti, D., & Rusdiyanta. (2018). Analisis Peran United Nations Children's Fund's Dalam Melindungi Anak dari Prostitusi di Thailand Tahun 0224-2025. *Univerrsitat Budi Luhur*.
- Ramirez, & et.al. (2013). Sex Tourism As One Factor Of Tourism Industry.
- Sitanggang, Y. H. (2015). Peran End Child Prostitution Child Pornography, and Human Trafficking for Sexual Purpose (ECPAT) Dalam Mengatasi Masalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Filipina (2009-2013). *Skripsi Jurusan Hubungan Internasional Universitas Riau*.
- Subarkah, A. (2018). Peran ECPAT dalam Menangani Child Sex Tourism di Indonesia (Studi Kasus: Bali). *Jurnal Transborders*, 67-82.
- Truong, T. (2008). The Dynamics of Sex Tourism: The Case of Southeast Asia. *Development and Change. Researchgate*.
- Unerman, J., & O'Dwyer, B. (2006). On James Bond and the importance of NGO accountability. *Accounting, Auditing, & Accountability Journal*, 305-318.
- UNICEF Thailand. (2021). *Child Protection*. Retrieved from UNICEF Thailand: <https://www.unicef.org/thailand/child-protection>.
- Widhi, M. (2018). Peran Pemerintah Thailand Dalam Menanggulangi Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Thailand. *Journal of International Relations*, 730-738.
- UNHCR. 2015. "2015 Trafficking in Persons Report - Thailand